

---

---

## ***Framing Oleh NGO Terkait Pelaksanaan Bahrain Grand Prix Sebagai Alat Sportswashing Terhadap Isu Pelanggaran HAM***

Angie Marsha Patty<sup>1)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>2)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

---

### **Abstrak**

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bahrain sejak *Arab Spring* hingga kini terus berlanjut dan justru makin parah. Hal ini menjadi perhatian bagi publik internasional, diantaranya *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bergerak dalam isu kemanusiaan serta berbagai media yang membantu dalam pengangkatan isu, baik domestik maupun internasional. Menyikapi hal tersebut, respon dari Pemerintah Bahrain dianggap lambat ditambah dengan adanya pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* ditengah pelanggaran HAM yang terjadi. Masyarakat pun menuntut aksi nyata dan pertanggungjawaban Pemerintah Bahrain melalui protes yang berujung ricuh karena keterlibatan berbagai pihak. Pengangkatan isu pelanggaran HAM ini dibatasi oleh Pemerintah Bahrain melalui tindakan represif, seperti menangkap dan menahan aktivis hingga membatasi akses terhadap media. Tindakan Pemerintah Bahrain tersebut dibingkai sebagai bentuk *sportswashing* untuk menutupi isu pelanggaran HAM yang terjadi. Untuk membantu advokasi isu tersebut, para aktivis, media dan NGO melakukan framing terhadap pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* pada tahun 2011-2020 guna mengangkat isu pelanggaran HAM yang terjadi di Bahrain serta membentuk aliansi melalui pembentukan jaringan advokasi transnasional sebagai upaya untuk menekan Pemerintah Bahrain.

**Kata kunci:** *Agenda Setting, Bahrain Grand Prix, NGO, Pelanggaran HAM, Sportswashing*

---

### **Abstract**

*Human rights violations in Bahrain since the Arab Spring have continued and are getting worse. This is a concern for the international public, including Non-governmental Organizations (NGOs) working on humanitarian issues as well as various media that assist in raising issues, both domestically and internationally. Responding to this, the response from the Government of Bahrain is considered slow, coupled with the implementation of the Bahrain Grand Prix in the midst of human rights violations. The public also demanded real action and accountability from the Government of Bahrain through protests that ended in chaos due to the involvement of various parties. The issue of human rights violations has been limited by the Bahraini government through repressive measures, such as arresting and detaining activists and restricting access to the media. The Bahraini government's action was framed as a form of sports washing to cover up the issue of human rights violations that occurred. To help advocate for these issues, activists, media, and NGOs framed the Bahrain Grand Prix in 2011-2020 to raise the issue of human rights*

*violations that occurred in Bahrain and form an alliance through the establishment of a transnational advocacy network as an effort to pressure the Bahraini government.*

**Keywords:** *Agenda Setting, Bahrain Grand Prix, Human Rights, NGO, Sportwashing*

---

**Kontak Penulis**

Angie Marsha Patty

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali 80234

Telp: +62 (361) 701812 Fax: +62 (361) 701907

E-mail: [angie.pattij@gmail.com](mailto:angie.pattij@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Bahrain merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Timur Tengah dan hingga kini masih menghadapi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diawali ketika adanya *Arab Spring* yaitu pergolakan politik diantaranya gelombang revolusi dan unjuk rasa yang terjadi di berbagai belahan dunia Arab. Protes massa ini dilakukan karena adanya tindakan diktator, otoriter, korup dan penindasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh pemimpin negara di belahan dunia Arab agar dapat digulingkan, diturunkan, dilengserkan serta dikudeta dari jabatannya (Agastya ABM, 2013: 12). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pecahnya *Arab Spring* yaitu pelanggaran HAM, kemiskinan, diktator, pengangguran, meningkatnya harga kebutuhan pokok, monopoli kekayaan dan korupsi oleh pejabat serta masalah ekonomi dan politik yang sudah ada sejak lama. Pelanggaran HAM di Bahrain sejak *Arab Spring* hingga kini terus berlanjut dan justru makin parah. Hal ini menjadi perhatian bagi publik internasional, diantaranya *Non-governmental Organization* (NGO) yang bergerak dalam isu kemanusiaan, baik NGO domestik maupun NGO internasional dan sering kali diangkat dalam berita, artikel bahkan dijadikan sebagai penelitian.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Bahrain melakukan penyelidikan melalui lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Menurut *2020 Country Reports on Human Rights Practice* yang dikeluarkan oleh *United States Department of State*, diklaim oleh NGO yang bergerak di isu HAM, penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Bahrain cenderung lambat dan kurang transparan (Bureau of Democracy, 2020). Hal ini menjadi faktor yang melatarbelakangi mengapa berbagai artikel maupun pernyataan dari NGO yang membingkai isu ini dengan istilah '*sportswashing*' agar dapat didengar oleh Pemerintah Bahrain selaku negara penyelenggara, F1 selaku institusi penyelenggara balapan maupun publik internasional.

'*Sportswashing*' yaitu ketika suatu negara menggunakan olahraga untuk membersihkan pelanggaran HAM di masa lalu maupun mengalihkan publik dari pelanggaran HAM yang sedang terjadi serta meningkatkan citra negaranya. Hingga saat ini, olahraga merupakan salah satu tolak ukur perkembangan suatu negara dan bagaimana suatu negara memperlihatkan eksistensinya dalam hubungan internasional untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Pengkajian terhadap hubungan antara olahraga sering dilakukan karena bagi politisi, untuk dapat menarik massa dalam jumlah banyak, olahraga dapat menjangkau bagian yang tidak dapat dijangkau oleh institusi lainnya. Menurut Danyel Reiche (2014: 2), olahraga dapat menjadi media dari pemerintah untuk menyampaikan pesan ke masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Reiche juga berpendapat bahwa olahraga dapat digunakan sebagai pengalihan bagi publik terhadap suatu isu dalam negara dan dapat menjadi '*opiate of the masses*' atau candu bagi massa. Pemerintah juga cenderung menggunakan olahraga sebagai alat komunikasi politik untuk kepentingan politik mereka.

*Formula One (F1) Racing* merupakan salah satu olahraga terpopuler di dunia dimana terhitung penonton F1 lebih banyak 340 juta melebihi *National Football League* (NFL). Pelaksanaan *F1 Racing* dilakukan di berbagai negara, salah satunya di Bahrain dengan sebutan *Bahrain Grand Prix*. *Bahrain Grand Prix* pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan selalu menjadi kontroversi antara pemerintah dan masyarakat publik di Bahrain karena adanya pelanggaran HAM yang terjadi.

Berdasarkan artikel yang dirilis oleh *Human Rights Watch* pada tahun 2012, menurut pemerintah, *Bahrain Grand Prix* diharapkan menghasilkan pendapatan yang signifikan, tetapi disisi lain digunakan untuk mendukung klaim pemerintah Bahrain bahwa krisis politik dan HAM di negara itu telah berakhir. Pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* apabila dibandingkan dengan semua grand prix di kalender F1 mendapatkan dampak ekonomi

domestik terbesar dan berjumlah dua kali lipat dari balapan lainnya yaitu sebanyak \$220m per balapan serta mendatangkan lebih dari 2,2 miliar orang dalam balapan lima tahun terakhir (Arabianbusiness, 2013).

Penggunaan *Bahrain Grand Prix* oleh pemerintah bisa dikatakan merupakan sebuah tindakan aktor dalam melakukan pengalihan terhadap isu pelanggaran HAM di Bahrain. Melihat hal tersebut pada tahun 2015 setelah penindasan kekerasan Bahrain terhadap protes pada *race*, F1 mengadopsi kebijakan HAM setelah arbitrase dengan *Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain* (ADHRB) yang berkomitmen F1 untuk mengidentifikasi setiap permasalahan HAM. Namun, hingga tahun 2020, F1 masih belum memberikan kompensasi tersebut hingga di-mention dalam *Joint NGO Letter to Formula 1 on the Bahrain Grand Prix 2020*. Hal ini menunjukkan gagalannya komitmen F1 terhadap perlindungan HAM dan memperlihatkan bagaimana Pemerintah Bahrain menggunakan *Bahrain Grand Prix* sebagai alat 'sportswashing' dari tahun 2011 hingga 2020.

Penelitian ini akan menjelaskan proses *framing* yang dilakukan oleh NGO yang bergerak dalam isu HAM, baik NGO domestik maupun internasional, terhadap pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* pada tahun 2011-2020 guna mengangkat isu pelanggaran HAM yang terjadi di Bahrain serta dampak dari *framing* tersebut sebagai upaya untuk menekan Pemerintah Bahrain dalam penanganan isu pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan itu, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian dengan teori *Agenda Setting* untuk menjelaskan proses *framing* oleh NGO dan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) untuk menjelaskan bagaimana peran aliansi NGO domestik dan internasional.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa artikel dari jurnal serta penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya yang relevan sebagai tinjauan pustaka diantaranya: Pertama, Artikel Geoffrey Allen Pigman dalam Jurnal *Diplomacy & Statecraft* yang berjudul *International Sport and Diplomacy's Public Dimension: Governments,*

*Sporting Federations and the Global Audience*. Dalam artikel ini, Pigman membahas bagaimana pemanfaatan olahraga untuk mengembalikan citra buruk suatu negara akibat suatu isu dengan mengalihkan publik dari isu dan mengubah cara pandang mereka. Pigman berpendapat bahwa pemanfaatan olahraga ini dapat dilakukan sebagai instrumen politik atau diplomasi dan alat komunikasi antar negara. Artikel ini peneliti gunakan untuk membahas lebih lanjut bagaimana Pemerintah Bahrain memanfaatkan salah satu olahraga bergengsi di dunia yaitu *Formula 1 (F1) Race* dalam hal ini *Bahrain Grand Prix* sebagai alat politik pemerintahan baik secara domestik maupun internasional terhadap promosi negara Bahrain, pemanfaatan olahraga guna mengalihkan dan mengubah cara pandang publik hingga untuk mengembalikan citra buruk negara.

Kedua, Artikel Chris Sidoti yang berjudul *Rules Beyond the Game* menjelaskan bagaimana olahraga dapat membantu memajukan dan menegakkan HAM melalui penyelenggaraan acara olahraga besar di suatu negara. Dalam penyelenggaraan olahraga, para atlet yang terlibat dapat menjadi model dalam ranah HAM bagi publik terkait partisipasi atlet yang memiliki beragam latar belakang (ras, etnis, jenis kelamin, usia dan pengelompokan sosial lainnya). Atlet dalam olahraga pun dapat menghancurkan stereotip dalam pengelompokan yang ada melalui pengaruh mereka dalam suatu komunitas, salah satunya dalam promosi HAM di bidang olahraga. Lebih lanjutnya, Chris menjelaskan bahwa bagaimana penyelenggaraan acara olahraga yang besar seperti *World Cup* dan *Olympic* dapat menarik perhatian dunia melalui media internasional dan perspektif bagi wartawan dalam mencari berita untuk mengangkat isu-isu dalam negara, salah satunya isu terkait HAM. Artikel ini peneliti gunakan sebagai acuan terhadap bagaimana seharusnya penyelenggaraan acara olahraga dapat mengangkat isu-isu terkait HAM namun sebaliknya apabila dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian ini, penyelenggaraan acara olahraga tersebut justru dijadikan alat untuk menutupi isu pelanggaran HAM itu sendiri.

Ketiga, Artikel Michal Marcin Kobierecki dan Piotr Stozek dalam Jurnal *International Politics* yang berjudul *Sports mega-events and shaping the international image of states: how hosting the Olympic Games and FIFA World Cups affects interest in host nations*. Dalam artikel ini, Michal dan Piotr membahas bagaimana ketika suatu negara menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan *mega-event* olahraga dapat dimanfaatkan sebagai *soft power* dan memperbaiki citra yang tercoreng atau yang disebut *sportswashing*. Artikel ini mengacu pada upaya negara-negara demokratis dan non-demokratis untuk meningkatkan eksistensi secara internasional dan meningkatkan citra negaranya melalui penyelenggaraan acara olahraga. Adapun asumsi terhadap *sportswashing* yang dilakukan oleh negara-negara dengan catatan HAM yang buruk. Artikel ini peneliti gunakan sebagai acuan terhadap pemanfaatan penyelenggaraan acara olahraga sebagai alat *sportswashing* sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Bahrain dalam *Bahrain Grand Prix*. Lebih lanjutnya, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti bagaimana proses dan *output* dari *sportswashing* yang dilakukan.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif menjelaskan penelitian menggunakan bahasa atau kata-kata dan tidak menggunakan angka. Metode deskriptif dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan mengenai proses advokasi HAM yang dilakukan oleh NGO terhadap isu pelanggaran HAM yang dialihkan Pemerintah Bahrain menggunakan *Bahrain Grand Prix* pada tahun 2011 hingga 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahrain merupakan negara yang terletak di Timur Tengah. Mayoritas penduduknya menganut ajaran Islam dan memiliki dua

kelompok masyarakat mayoritas yakni Sunni dan Syiah (Slosberg, 2012). Apabila melihat sejarahnya, Bahrain pernah diduduki oleh Persia serta menjalin kerja sama dengan beberapa negara seperti Inggris dan AS. Secara politik, dari tahun 1783 kekuasaan di Bahrain dipegang oleh keluarga Al-Khalifa yakni anggota dari kelompok Sunni dan hingga kini dinasti tersebut masih berlanjut.

Bahrain menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, dikepalai oleh raja dibantu kabinet yang terdiri dari 24 menteri yakni 12 menteri dari anggota keluarga penguasa atau dinasti Al-Khalifa serta perdana menteri yang tidak harus menjadi anggota parlemen. Hal tersebut membuat suasana di Bahrain cukup tegang karena mayoritas kekuasaan dipegang oleh anggota dari kelompok Sunni sehingga dirasa tidak adil oleh kelompok Syiah. Selain itu, perbedaan signifikan turut terlihat dalam nilai-nilai, pandangan politik dan situasi ekonomi sehingga cukup memengaruhi perspektif masyarakat Bahrain.

Pergolakan pertama terjadi pada tahun 1975 saat dinasti Al-Khalifa membubarkan parlemen secara sepihak sehingga memunculkan tuntutan dari rakyat untuk membentuk kembali parlemen. Dibubarkannya parlemen oleh Raja Isa Al-Khalifa setelah dua tahun berjalan ialah karena adanya kegagalan dan kurang efektif dalam kebijakan negara. Namun, hal tersebut justru dilihat masyarakat sebagai upaya Raja untuk mempertahankan kekuasaannya (Abdulah, 2021). Selanjutnya pada tahun 1979 saat Revolusi Iran pecah, cukup memengaruhi Bahrain dimana 2 tahun setelahnya Iran turut terlibat dalam pembebasan masyarakat Bahrain oleh kelompok radikal masyarakat Syiah terhadap dinasti Al-Khalifa (Byman, 2008: 170).

Protes masih berlanjut pada tahun 1994 atas dasar diskriminasi dan pemulihan hak-hak demokrasi kepada pemerintah. Protes ini memakan ribuan korban yang ditangkap, ditahan, diasingkan dan disiksa. Pada tahun 1999, ketika kepemimpinan negara diambil alih Sheikh Hamad, kerusuhan sipil dihentikan dengan reformasi ekonomi dan politik sebagai

upaya untuk meningkatkan hubungan dengan oposisi partai. Usaha ini dinyatakan sebagai reformasi bersejarah bagi HAM oleh *Amnesty International*.

Pada pecahnya *Arab Spring* akhir tahun 2010 protes turut dilakukan masyarakat Bahrain terhadap Pemerintah untuk revolusi politik. Lebih lanjutnya pada pelaksanaan pemilu Bahrain tahun 2011 terjadi boikot oleh masyarakat politik oposisi akibat klaim dari organisasi yang bergerak dalam HAM bahwa Pemilu 2011 yang tidak bebas dan adil sehingga terjadi kerusuhan yang berkelanjutan. Boikot ini memunculkan adanya seruan massa untuk reformasi politik serta kerusuhan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh BICI, GCC menempatkan pasukan keamanan PSF untuk meminimalisir kerusuhan dan pada akhirnya menyebabkan 52 korban jiwa, 35 jiwa yang meninggal, tambahan 17 jiwa dimana sebanyak 5 dari 35 jiwa disiksa oleh oknum aparat keamanan.

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya pelanggaran HAM yang terus berlarut, protes tidak lagi dilakukan oleh kelompok masyarakat Syiah saja melainkan sudah menjangkau berbagai kelompok masyarakat untuk pencabutan Raja Al-Khalifa dari jabatannya (*Middle East Journal*, 2013). Dengan adanya pelanggaran HAM yang terjadi dan tidak adanya aksi nyata Pemerintah Bahrain, masyarakat mengalihkan protes terhadap pelaksanaan *Bahrain Grand Prix 2011* hingga balapan dibatalkan. *Bahrain Grand Prix* pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 di *Bahrain International Circuit* (BIC), Sakhir. BIC merupakan sirkuit internasional pertama di Timur Tengah dan mendapatkan penghargaan sebagai balapan yang teroganisir dengan baik. Pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* berdampak signifikan terhadap perekonomian Bahrain dimana sejak pelaksanaannya pada tahun 2004 dan seterusnya terus meningkat baik secara pendapatan resmi, periklanan, pariwisata, maupun tersedianya lowongan kerja yang baru. (Cabi.org, 2007).

BIC dibangun sedemikian rupa agar kemudian dapat digunakan untuk menarik *motor sports F1* sebagai pemenuhan *national*

*interest*. Secara ekonomi, pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* menghasilkan pendapatan yang signifikan dengan berbagai sumber pendapatan diantaranya peningkatan dalam sisi pariwisata hingga investor asing.

Pembatalan pelaksanaan *Bahrain Grand Prix 2011* menyebabkan menyebabkan berbagai kerugian. Menurut Esam Fakhro, Ketua *Bahrain Chamber of Commerce and Industry* (BCCI), kerugian yang dialami Bahrain mencapai US\$ 2M. Selain itu, pembatalan pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* berisiko terhadap hilangnya gelar Bahrain sebagai "*The Home of Motorsport in the Middle East*". Selanjutnya, berdampak pada status jangka panjang Bahrain sebagai pusat perbankan dan keuangan regional serta global.

Selain itu, protes yang terjadi memengaruhi status Bahrain dan menyebabkan banyaknya *travel warning* yang dikeluarkan oleh berbagai negara, salah satunya AS (*Theguardian.com*, 2011). Protes yang terus berlanjut juga memengaruhi status Bahrain diantaranya *Reporters Without Borders* menyatakan bahwa Bahrain merupakan salah satu rezim paling represif di dunia dan *Freedom House* yang menurunkan peringkat Bahrain dari "sebagian bebas" menjadi "tidak bebas".

Hal tersebut memunculkan dugaan publik bahwasannya pelaksanaan F1 hanyalah untuk menaikkan citra Bahrain dengan menutupi pelanggaran HAM oleh pemerintah. Sehingga pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* menjadi fokus baru advokasi HAM di Bahrain dan pembatalan pelaksanaannya menjadi *goals* NGO untuk memermalukan Pemerintah Bahrain.

Dengan berlanjutnya protes, Pemerintah Bahrain terus berusaha untuk membungkam pengangkatan isu ini diantaranya penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang merendahkan, kondisi penjara yang tidak manusiawi, penahanan sewenang-wenang, kurangnya akses yang memadai ke perawatan medis di penjara, campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum privasi, pembatasan kebebasan ekspresi, pers, dan internet, pencemaran nama baik, dan penangkapan yang berasal dari aktivitas media sosial, hukum yang terlalu membatasi pada organisasi non-

pemerintah independen, pembatasan kebebasan gerakan, termasuk pencabutan kewarganegaraan, pembatasan partisipasi politik dan pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan berserikat pekerja (Bureau of Democracy, 2020).

Protes terus berlanjut dan selanjutnya diberitakan dalam media berdasarkan hasil wawancara bersama aktivis domestik hingga penayangan dokumentasi protes di media sehingga publik turut merespon diantaranya: 1) Kritik terhadap Pemerintah Bahrain oleh Presiden AS, Barack Obama untuk dilakukannya dialog terbuka serta pentingnya menindaklanjuti komitmen Pemerintah Bahrain terkait tanggung jawab terhadap korban (Reuters, 2011). 2) Penundaan kesepakatan penjualan senjata dan memperdalam penyelidikan pelanggaran sebelum melanjutkan negosiasi pada tahun 2011 serta pemindahan pejabat kedutaan AS. 3) Penangguhan terhadap ekspor gas air mata ke Bahrain oleh Pemerintah Korea Selatan karena adanya laporan terkait penyalahgunaan gas yang menyebabkan kematian demonstran (BBC News, 2014).

Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi terus dilakukan dengan berbagai hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah Bahrain sering menolak masuknya peneliti, aktivis HAM, media, akademis dan NGOs internasional (Congressional Research Service, 2022).
2. Laporan terkait pejabat pemerintah yang menghubungi editor dan melarang menerbitkan artikel tentang topik tertentu serta pemblokiran akses beberapa situs web oleh Pemerintah. Bagi para masyarakat yakni aktivis dan jurnalis HAM yang tetap memberitakan topik-topik sensitif menurut Pemerintah Bahrain dinterogasi secara berulang kali disertai dengan ancaman terhadap keselamatan fisik dan keluarga, mata pencaharian, dan penolakan layanan sosial sehingga beberapa aktivis menutup bahkan memutuskan untuk berhenti memposting di akun media sosial (Bureau of Democracy, 2020). Hal ini karena seluruh

media domestik Bahrain adalah milik Pemerintah.

3. Penganiayaan terhadap tahanan berdasarkan laporan penyiksaan dan penganiayaan terhadap demonstran yang ditahan sejak awal demonstrasi pada Februari 2011. Tuduhan tersebut dilihat sebagai upaya Pemerintah Bahrain dalam menghindari akuntabilitas dan tuntutan rakyat untuk reformasi politik yang lebih besar.
4. Laporan HRW 2013 yakni para aktivis ditangkap atas dasar "merusak keamanan negara", menyalahgunakan kebebasan berbicara dan hak kebebasan berekspresi. Para aktivis didakwa karena menghina Raja dan menulis pernyataan yang merusak nilai-nilai Bahrain. BICI menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 300 orang yang dihukum tidak sesuai dengan proses hukum (*Human Rights Watch*, 2013). Di tahun yang sama, terhitung sebanyak 31 aktivis lainnya yang dicabut status kewarganegaraan atas dasar "merusak keamanan negara". (Middle East Journal, 2013).

Respon turut diberikan oleh aktor internasional, salah satunya oleh Dewan HAM PBB yakni dengan melakukan pemeriksaan catatan HAM di bawah proses UPR. Pada September 2012, Bahrain secara resmi menerima sebagian besar rekomendasi tersebut yakni pertanggungjawaban pasukan keamanan atas pelanggaran hak, pembebasan segera tahanan yang dihukum karena berpartisipasi dalam demonstrasi damai dan pertanggungjawaban pejabat negara atas pelanggaran (*Human Rights Watch*, 2013). Namun, pada kenyataannya Pemerintah Bahrain tidak menerapkan rekomendasi tersebut tetapi justru kembali menangkap 29 demonstran pada September 2012. Selain itu, pada Juni 2012, beberapa negara termasuk Prancis dan Jerman melakukan deklarasi dalam debat HRC untuk Bahrain segera menerapkan sepenuhnya rekomendasi BICI sebagaimana yang sudah disampaikan (Middle East Journal, 2013).

*European Parliament* turut terlibat dalam mengkritisi situasi HAM di Bahrain melalui *The EP Resolution of March 11, 2021* terkait kondisi hak dan keselamatan pembela HAM, utamanya sejak *Arab Spring* dan protes pada tahun 2011 yang belum diinvestigasi dengan jelas dan independen atas tuduhan pelanggaran dari pihak Pemerintah. EP juga menemukan bahwa masih belum ada penyelidikan secara efektif dan independen. EP menuding bahwa Raja dan pemerintahannya telah mengkompromikan setiap upaya aktual untuk mencegah reformasi Bahrain untuk menjadi negara demokratis dan menghormati HAM (European Parliament, 2021).

Beberapa pelanggaran sangat di-*highlight* dan terus diangkat yakni penangkapan paksa terhadap para aktivis, kekerasan oleh pasukan keamanan dalam represi protes, para aktivis yang diadili secara tidak adil serta penyiksaan terhadap mereka di dalam tahanan. Selain itu, kebebasan untuk berekspresi, berbicara, kebebasan akses terhadap media domestik hingga akses terhadap media dan NGOs internasional ke Bahrain turut dibahas dari tahun ke tahun. Pelanggaran-pelanggaran tersebut selalu tercantum dalam berbagai laporan NGOs terkait HAM Bahrain dari tahun 2011-2020.

Berdasarkan pemaparan di atas, pengangkatan isu pelanggaran HAM ini sebelumnya sudah diangkat oleh aktivis, jurnalis dan NGO domestik Bahrain yang memiliki fokus utama dalam permasalahan HAM. Namun, karena adanya represi dari Pemerintah Bahrain dalam bentuk penangkapan secara paksa dan diasingkannya para demonstran menyebabkan pentingnya arena transnasional sebagai ruang sosial dalam membantu pengangkatan isu ini. Selain itu, adapun beberapa NGOs yang dibentuk untuk membantu gerakan HAM di Bahrain. Adapun NGOs tersebut diantaranya *Bahrain Institute for Rights and Democracy* (BIRD), *Americans for Democracy and Human Rights* (ADHRB), serta tiga NGOs lainnya yang dibentuk di Eropa. Para aktivis politik Bahrain yang diasingkan di London pun turut membantu melalui NGO *Salam for Human Rights*. Dalam pengangkatan

isu, para NGOs bekerja sama dengan *Amnesty International* dan HRW yang sudah lebih dahulu turun di Bahrain terkait permasalahan HAM yang terjadi (Bhatia, 2017).

Pembingkaian oleh NGO terkait *sportswashing* Pemerintah Bahrain ini didasari oleh persamaan agenda, dalam hal ini *concern* terhadap pelanggaran HAM di Bahrain. Hal tersebut dilakukan melihat bagaimana kondisi nyata di dalam negara Bahrain terkait upaya yang dilakukan oleh para aktivis, jurnalis dan media domestik dalam pengangkatan isu HAM yang pada akhirnya dibungkam oleh Pemerintah Bahrain. Dengan informasi yang diberikan oleh aktivis dan jurnalis domestik kepada INGO dan NGO internasional serta persamaan agenda yang dimiliki terhadap advokasi HAM di Bahrain. Tentunya pengangkatan isu tidak mudah dengan adanya pembungkaman dari Pemerintah Bahrain, terlebih lagi bagaimana Pemerintah menutup akses terhadap media domestik dan internasional hingga akses masuk terhadap NGO internasional yang ingin membantu. Penonjolan isu (*priming*) HAM di Bahrain awalnya dilakukan dengan pemberitaan protes yang terhadap pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* sedangkan tuntutan masyarakat untuk demokrasi tidak didengar dan terbungkam dengan pelaksanaan balapan tersebut.

Lebih lanjutnya, *framing* dilakukan ketika muncul istilah *sportswashing* di pemberitaan-pemberitaan yang membahas bagaimana Pemerintah Bahrain lebih mementingkan citra internasional daripada pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya. Hal ini memperlihatkan bagaimana *ignorant*-nya Pemerintah Bahrain terhadap isu pelanggaran HAM. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Merilainen dan Vos bahwa dalam isu HAM, sering kali pemerintahan suatu negara tidak terlalu memperhatikan atau bahkan mengabaikan HAM dan dalam hukumnya tidak terlalu memperhatikan HAM namun tetap berusaha untuk mempertahankan citra positif mereka di publik internasional (Merilainen & Vos 2011: 293-310). Hal inilah yang kemudian dapat diangkat oleh para NGO yang bergerak dalam permasalahan HAM.

Menurut Nelson, terdapat 5 strategi politik atau *agenda setting* yang dilakukan oleh NGO diantaranya:

1. NGOs menggunakan institusi tertentu untuk memengaruhi keputusan kebijakan domestik. Hal ini dilihat ketika NGOs menjalin kerja sama baik secara domestik maupun internasional dengan berbagai aktor dan institusi untuk menekan Pemerintah Bahrain. Aktor dan institusi yang dilibatkan ialah seperti PBB, HRW, *Amnesty International*, dan berbagai NGOs lainnya hingga institusi penyelenggara acara balapan yakni F1. "Penyenggolan" yang dilakukan terhadap F1 sempat memberikan *output* yaitu pada tahun 2015 setelah penindasan kekerasan Bahrain terhadap protes pada *race*, F1 mengadopsi kebijakan HAM setelah melakukan arbitrase dengan ADHRB. Arbitrase ditujukan untuk mempertegas komitmen F1 untuk mengidentifikasi setiap permasalahan HAM. Namun, seiring berjalannya waktu, respon Pemerintah Bahrain masih minim sehingga NGOs mencoba untuk kembali "menyenggol" F1 melalui *Joint NGO Letter* agar isu pelanggaran HAM Bahrain lebih dilihat. Perilisan *Joint NGO Letter* ini dilakukan di berbagai media dan laman resmi milik NGOs dan cukup mendapatkan perhatian publik internasional sehingga dapat membantu advokasi HAM di Bahrain.
2. NGOs menyebarkan informasi guna mendapatkan tekanan melalui publik internasional. Penyebaran informasi dipicu oleh pembatasan akses terhadap media domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Bahrain sebagai bentuk pembungkaman terhadap isu yang terjadi. Informasi disebarkan melalui pemberitaan di berbagai media, baik domestik maupun internasional. Informasi yang disebarkan adalah hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh para NGOs dan dijadikan sebagai laporan terkait HAM Bahrain yang rutin dirilis tiap tahunnya.
3. NGOs memobilisasi dukungan pemerintah suatu negara untuk suatu isu. Melalui penyebaran informasi yang sudah dilakukan tentunya dapat menjadi perhatian publik internasional, termasuk pemerintah suatu negara. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan ialah dengan mengkritisi komitmen HAM Pemerintah Bahrain saat pelaksanaan Sidang HAM PBB. Selain itu pun terdapat beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah negara lain, seperti AS pada saat merespon protes yang terjadi di Bahrain dengan menuntut penyelidikan lebih mendalam dan dilakukannya dialog terbuka serta pembatalan kerja sama yakni ekspor gas air mata oleh Korea Selatan.
4. NGOs membentuk aliansi dengan aktor internasional lainnya. Pembentukan aliansi dilakukan atas dasar kesamaan agenda yakni *concern* terhadap isu pelanggaran HAM di Bahrain dan pembungkaman yang dilakukan Pemerintah Bahrain. Tujuan dibentuknya aliansi ini ialah untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk sumber daya dan untuk lebih menekan Pemerintah Bahrain.
5. NGOs menyoroti kegagalan kebijakan maupun keputusan pemerintahan suatu negara untuk mendukung kebijakan atau struktur baru. Kegagalan yang disorot ialah terkait kebijakan HAM Bahrain dan tindakan pembungkaman yang dilakukan Pemerintah Bahrain. Kegagalan komitmen F1 terkait HAM pun turut disorot melalui *Joint NGO Letter* selaku badan penyelenggara acara balapan. Selain itu juga melalui beberapa respon Pemerintah Bahrain seperti tidak dilakukannya berbagai rekomendasi yang diberikan NGO untuk memperbaiki HAM di Bahrain menjadi fokus para NGOs. Hal tersebut karena Pemerintah Bahrain lebih memperhatikan citra publiknya dengan tetap melaksanakan *Bahrain Grand Prix* untuk mengalihkan pelanggaran HAM yang terjadi.

Sulitnya advokasi terkait isu pelanggaran HAM di Bahrain dan minimnya respon Pemerintah Bahrain terhadap penyelidikan

membuat kasus ini terus berlanjut hingga satu dekade. Sehingga para NGO pun berusaha mencari cara lain untuk mengangkat isu ini agar dilihat rezim HAM internasional. Advokasi dilakukan dengan tetap mengangkat istilah *sportswashing* tetapi ditujukan kepada F1 sebagai badan penyelenggara balapan melalui *Joint NGO Letter* yang ditujukan untuk Pemerintah Bahrain hingga F1 yakni pada tahun 2014, 2017, 2019 hingga 2022. Penandatanganan *Joint Letter* dilakukan oleh berbagai NGO yang bergerak di permasalahan HAM dan tiap tahun jumlahnya bertambah banyak dari *Joint Letter* yang sebelumnya (ADHRB, 2022).

Secara garis besar, *Joint Letter* mencantumkan keprihatinan terhadap *sportswashing* yang dilakukan oleh Pemerintah Bahrain serta komitmen F1 terhadap permasalahan HAM dari berbagai NGO. F1 diharapkan untuk melakukan penyelidikan independen terhadap implikasi HAM dari kehadiran F1 di Bahrain, khususnya pelanggaran yang terjadi. Selain itu, tuntutan ganti rugi terhadap para korban yang ditangkap secara paksa oleh Pemerintah Bahrain sebagai bentuk pembungkaman bagi kritik terhadap pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* hingga tahun 2020 masih belum terealisasi.

Adapun empat strategi yang digunakan dalam pelaksanaan konsep TAN, yaitu:

1. *Information politics: blockage* Pemerintah Bahrain terhadap aktor domestik untuk mempersulit upaya advokasi isu HAM sehingga mengharuskan aktor domestik berdialog dan memberikan informasi kepada aktor internasional terkait pelanggaran yang terjadi. Awal mula informasi disebarkan melalui media domestik, merambah kepada penyediaan informasi kepada para delegasi badan penyelidik hingga pemberitaan di media internasional. Penyediaan informasi ini kemudian membuahkan aliansi atau jaringan baru dengan aktor-aktor internasional dan dalam pengangkatan isu HAM di Bahrain lebih efektif.
2. *Symbolic politics*: penggunaan istilah *sportswashing*, masyarakat internasional

sehingga seiring berjalannya waktu, dengan bantuan aktor internasional isu HAM Bahrain kemudian makin di-notice oleh masyarakat internasional.

3. *Leverage politics*: dilibatkan berbagai aktor yang memiliki *power* kuat seperti PBB, *Amnesty International*, beberapa media internasional hingga beberapa respon yang diberikan oleh pemimpin negara seperti Barack Obama pun dijadikan desakan terhadap Pemerintah Bahrain. Pembahasan isu HAM Bahrain dalam Sidang HAM PBB yang dihadiri berbagai negara anggota PBB cukup membantu dalam mengkritisi komitmen dan menekan Pemerintah Bahrain. Selain itu, *Joint NGO Letter* sebagai bentuk advokasi para NGO yang bergerak dalam permasalahan HAM turut menjadi tuntutan lainnya, bukan hanya bagi Pemerintah Bahrain melainkan juga terhadap F1.
4. *Accountability politics*: ketika Pemerintah Bahrain dipertanyakan komitmennya terhadap HAM oleh rezim HAM internasional dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Pertanyaan turut dilontarkan bagi F1 selaku badan penyelenggara acara balapan terkait komitmennya terhadap permasalahan HAM dan dorongan dari rezim HAM internasional untuk segera melaksanakan penyelidikan terhadap isu pelanggaran HAM yang terjadi.

Melalui empat strategi, proses yang panjang, dan waktu satu dekade memperlihatkan bagaimana sulitnya advokasi ke internasional. Proses panjang tersebut merupakan bukti bahwa peran pemerintah dalam suatu isu sangat penting, dalam hal ini bagaimana kita bisa melihat Pemerintah Bahrain membungkam masyarakatnya terhadap suatu isu. Peran penting lainnya dipegang oleh para aktivis dan jurnalis domestik yang dalam komitmennya tetap mengangkat isu ini meskipun adanya represi dari Pemerintah. Pentingnya peran dan komitmen para aktivis dalam TAN terkait penguatan suara-suara dari lingkup domestik

untuk meningkatkan kesadaran akan realita pelanggaran yang terjadi. Hal ini dilakukan karena untuk mewujudkan reformasi yang nyata, perlu adanya tekanan terhadap Pemerintah dari bawah (aktivis domestik) dan bahwa TAN sebagai bantuan serta fasilitator dalam proses tersebut. Selain itu, rezim HAM internasional turut penting dalam pengangkatan isu ini karena berhasil membantu memberitakan dan mendesak Pemerintah Bahrain untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di negaranya.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penemuan sebelumnya, Peneliti menemukan bahwa penggunaan istilah *sportswashing* terhadap pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* di Bahrain merupakan *framing* yang dilakukan oleh komunitas NGO yang bergerak dalam isu kemanusiaan. *Framing* dilakukan karena minimnya respon dari Pemerintah Bahrain terhadap isu pelanggaran HAM yang terjadi dan pelaksanaan *Bahrain Grand Prix* yang dirasa kurang tepat melihat kondisi HAM di Bahrain yang masih belum teratasi sehingga memicu terjadinya protes. Namun, dalam realitanya Pemerintah Bahrain melakukan represi terhadap para demonstran dan berusaha untuk membungkam para advokator HAM domestik.

Tindakan Pemerintah Bahrain yang tidak terlalu memperhatikan atau bahkan mengabaikan HAM dan dalam hukumnya tidak terlalu memperhatikan HAM namun tetap berusaha untuk mempertahankan citra positif mereka di publik internasional menjadi celah bagi para NGO, IGO dan INGO yang bergerak di isu kemanusiaan untuk menyamakan agenda mereka terkait advokasi terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Kesamaan agenda terkait advokasi HAM ini dilakukan dengan pemberitaan di berbagai media dan berdasarkan hasil laporan penyelidikan terkait HAM Bahrain. Merambahnya advokasi HAM Bahrain di lingkup internasional tentunya sangat membantu para advokator domestik sehingga dalam pengangkatan isu semakin dilihat publik sehingga kemudian berhasil membentuk

sebuah jaringan baru yaitu Jaringan Advokasi Transnasional untuk membantu advokasi yang terhambat secara domestik dan untuk mengangkat isu HAM di Bahrain agar lebih diperhatikan oleh Rezim HAM Internasional. Adapun alur dalam TAN yang terbentuk ialah adanya penyediaan informasi oleh advokator dan media domestik terhadap aktor internasional, penggunaan istilah *sportswashing*, melibatkan aktor-aktor dengan pengaruh besar hingga mempertanyakan komitmen HAM Pemerintah Bahrain dan F1 selaku badan penyelenggara acara balapan. Adapun *output* yang dicapai ialah semakin diperhatikannya isu pelanggaran HAM di Bahrain berdasarkan advokasi yang sudah dilakukan dalam satu dekade ini. Sayangnya, *pressure* yang diberikan kepada Pemerintah Bahrain masih terbilang kurang dilihat dari minimnya *feedback* dari Pemerintah Bahrain.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Joachim, J. M. (2007). *Agenda Setting, The UN, And NGOs Gender Violence and Reproductive Rights*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Keck, M. E. (1998). 1. Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction. In M. E. Keck, *Activists beyond Borders* (pp. 1-38). Cornell University Press.
- Sidoti, C. (1999). Rules beyond the game. *HOW YOU PLAY THE GAME*, 12.

### Jurnal:

- Bhatia, L. (2018). Intersections between the local and global: the local and global: the Bahrain human rights movement. *The International Journal of Human Rights*, 22(2), 286-304.
- Kobierecki, M. M. (2021). Sports mega-events and shaping the international image of states: how hosting the Olympic Games and FIFA World Cups affects interest in host nations. *International Politics*, 58(1), 49-70.
- Merilainen, N. &. (2011). Human rights organizations and online agenda setting. *Corporate Communications An International Journal*, 16(4), 293-310.
- Nelson, P. (2002). New Agendas and New Patterns of International NGO Political Action. *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 377-392.

- Pigman, G. A. (2014). International Sport and Diplomacy's Public Dimension: Governments, Sporting Federations and the Global Audience. *Diplomacy & Statecraft*, 25(1), 94-114.
- Reiche, D. (2014). Investing in sporting success as a domestic and foreign policy tool: the case of Qatar. *International Journal of Sport Polity*, 7(4), 1-16.
- Artikel Online:**
- Ali, J. (2015, April 17). *The F1's accelerator role in Bahrain's economy*. Retrieved from Gulf News: <https://gulfnews.com/business/analysis/the-f1s-accelerator-role-in-bahrains-economy-1.1493643>
- Arabianbusiness. (2013). *Has Bahrain got the formula the success?* Retrieved from Arabianbusiness: <https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/has-bahrain-got-formula-for-success-498643>
- BBC.com. (2014, Januari 8). *South Korea halts Bahrain tear gas exports*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25659108>
- Bull, A. (2011, June 8). *Obama urges Bahrain hold rights abusers accountable*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-usa-obama-bahrain-idINTRE75676220110607>
- Greenslade, R. (2017, Januari 26). *Activist faces prison for saying journalists are banned from Bahrain*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/media/greenslade/2017/jan/26/activist-faces-prison-for-saying-journalists-are-banned-from-bahrain>
- MarcoPolis. (2011, September 16). *Economic Effects of the Crisis in Bahrain: Direct Economic Loss to Reach US \$2bn*. Retrieved from <https://marcopolis.net/economic-effects-of-the-crisis-in-bahrain-direct-economic-loss-to-reach-us-2bn.htm>
- Simpson, D. (2007, April 25). *F1 big boost to Gulf tourism*. Retrieved from CABI: <https://www.cabi.org/leisuretourism/news/16712>
- Situs Resmi:**
- Bureau of Democracy, H. R. (2020). *2020 Country Reports on Human Rights Practices: Bahrain*. U.S Department of State.
- EDB Bahrain. (2015, April 21). *EDB Chief Executive hails the positive impact of the Formula One race on Bahrain's economy*. Retrieved from <https://www.bahrainedb.com/latest-news/edb-chief-executive-hails-the-positive-impact-of-the-formula-one-race-on-bahrains-economy>
- RacingCircuits.info. (2022). *Bahrain International Circuit*. Retrieved from RacingCircuits.info: <https://www.racingcircuits.info/middle-east/bahrain/bahrain-international-circuit.html#.YjLxIepBzDc>
- OHCHR. (2008-2017). *Universal Periodic Review - Bahrain*. Retrieved from United Nations Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/bh-index>
- Service, C. R. (2022). *Bahrain: Issues for U.S. Policy*. Amerika Serikat: Congressional Research Service.